



# LAPORAN KINERJA



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN



**2025**



# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI.....   | 1  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | 2  |
| DAFTAR TABEL .....  | 3  |
| KATA PENGANTAR.....   | 4  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....   | 5  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 8  |
| A. Latar Belakang.....  | 8  |
| B. Landasan Hukum .....   | 9  |
| C. Maksud Dan Tujuan .....  | 9  |
| D. Gambaran Umum Skpd .....                                       | 10 |
| E. Isu - Isu Strategis .....                                      | 13 |
| F. Sistematika Laporan .....                                      | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                  | 17 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.....                       | 17 |
| B. Rencana Kerja Tahun 2025.....                                  | 17 |
| C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....                        | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                               | 21 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                               | 21 |
| A.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi..... | 22 |
| A.2 Sasaran 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi.....          | 34 |
| B. Realisasi Anggaran.....  | 45 |
| BAB IV PENUTUP.....   | 52 |
| A. Kesimpulan.....  | 52 |
| B. Permasalahan Dan Tindak Lanjut .....                           | 53 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 1. 1</b> Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....                 | 12 |
| <b>Gambar 3. 1</b> Dokumentasi Penambahan Armada Angkutan.....                       | 26 |
| <b>Gambar 4. 1</b> Ringkasan Kendala dan Tindak Lanjut di Aplikasi E-Sakip Pro ..... | 54 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....  | 18 |
| Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2025...   | 18 |
| Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.....                                 | 20 |
| Tabel 3. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....                                | 22 |
| Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....                               | 23 |
| Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra .....                                       | 23 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional .....  | 24 |
| Tabel 3. 5 Persentase Load Factor tahun 2025.....  | 28 |
| Tabel 3.6 Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....                      | 31 |
| Tabel 3. 7 Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro).....   | 32 |
| Tabel 3. 8 Monev Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro).....   | 32 |
| Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....                                | 34 |
| Tabel 3. 10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....                              | 34 |
| Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra .....                                      | 35 |
| Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional ..... | 36 |
| Tabel 3. 13 Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan .....   | 41 |
| Tabel 3. 14 Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....                    | 43 |
| Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran .....   | 51 |
| Tabel 4. 1 Ringkasan Kendala dan Tindak Lanjut .....   | 53 |

# KATA PENGANTAR



Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan. Kinerja Dinas Perhubungan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun ada indikator yang belum menunjukkan capaian sesuai target karena keterbatasan pagu anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya Laporan Kinerja ini, kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di tahun berikutnya.

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Balangan

Drs. MUSA., M.AP  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196801131997031007

# Ringkasan Eksekutif



Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi kinerja utama (sasaran strategis), indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja lama tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memiliki 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada Perjanjian Kinerja Lama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

## TUJUAN

### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI

| Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                 | Target  | Realisasi | Capaian |
|--|---|---------|-----------|---------|
| Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Persentase Load Factor (kapasitas muatan)         | 108,10% | 107,21%   | 115,32% |
| Meningkatnya Keselamatan Transportasi          | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten | 99,99   | 100       | 100%    |

Untuk Capaian IKU PK Tahun 2025 yang merupakan kategori "**SANGAT MEMUASKAN**" untuk ke-2 (dua) indikatornya yaitu indikator.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator :

- Adanya Sistem Manajemen yang baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang terpadu, konsisten dan sinkron
- Adanya Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan pejabat pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku
- Adanya sistem mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- Adanya dukungan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana
- Dukungan sarana ETLT di Balangan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berbasis kesadaran, bukan ketakutan pada petugas. Jika diintegrasikan dengan pemeliharaan jalan yang baik dan penerangan jalan yang memadai
- Adanya SDM yang berkompetensi di dalam memberikan pelayanan

Faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja :

- Tidak adanya Penyediaan Angkutan oleh Pihak Swasta, Angkutan umum yang diselenggarakan oleh pihak swasta berperan besar dalam menghubungkan berbagai daerah di Kabupaten Balangan.
- Salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya kecelakaan di Kabupaten Balangan adalah kondisi jalan yang berlubang dan tidak terawat dengan baik. Jalan yang rusak, terutama yang berlubang

Keberhasilan pencapaian indikator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja. Adapun Realisasi APBD tahun 2025 sebesar Rp.58.972.796.286,00 atau 96,51% dari pagu sebesar Rp.61.148.979.181,00

# Pendahuluan

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Balangan No 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Untuk dapat menyelenggarakan *good governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan transportasi, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis

yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 4 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2025.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 kepada seluruh stakeholders.

2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

#### **D. GAMBARAN UMUM SKPD**

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

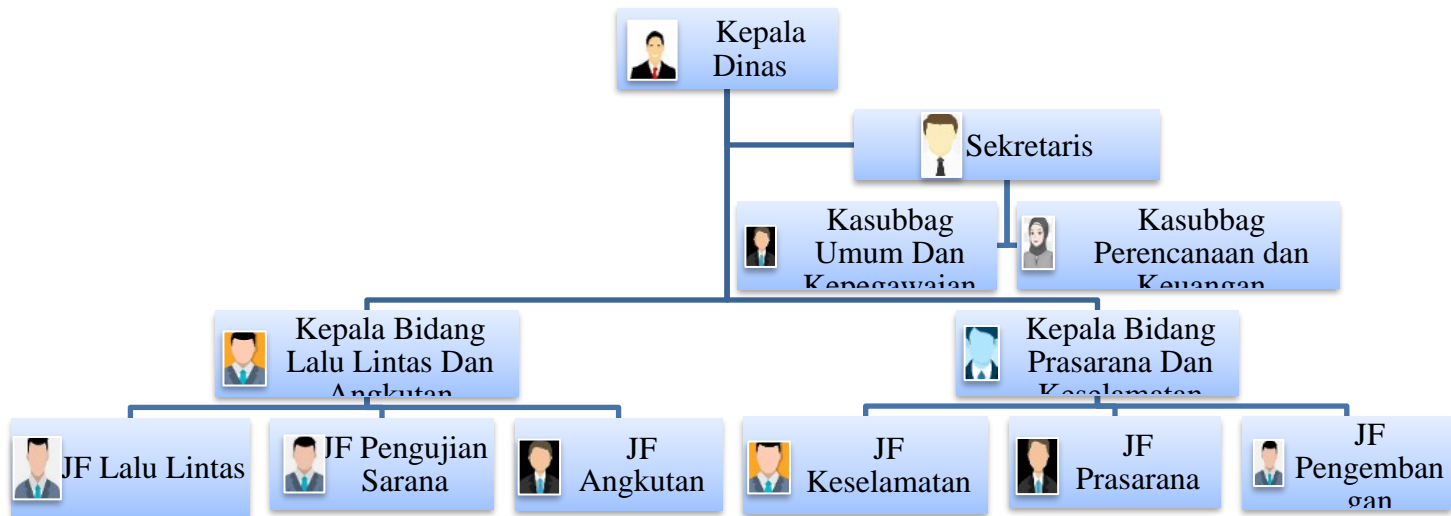
- a. Perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terdiri dari 1 (satu) (Kepala Dinas), 3 (tiga) Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 8 (delapan)

Eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional/Sub Koordinator). Secara rinci struktur organisasi tersebut, sebagaimana dibawah ini :

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

*Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan*

## E. Isu - Isu Strategis

Isu Isu strategis terkait urusan Perhubungan di Kabupaten Balangan dapat diuraikan antara lain Rendahnya Minat Angkutan Umum dan Masih adanya Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Balangan.

Beberapa faktor yang melatar belakangi isu ini antara lain:

- **Dominasi Kendaraan Pribadi:** Kemudahan akses kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat membuat masyarakat cenderung memilih moda transportasi pribadi yang dianggap lebih fleksibel dibandingkan angkutan umum.
- **Ketidakpastian Layanan:** Belum optimalnya keterpaduan jadwal (*headway*) dan rute/trayek yang menjangkau seluruh wilayah pelosok desa di Balangan menyebabkan masyarakat merasa angkutan umum tidak efektif secara waktu.
- **Kondisi Armada:** Sebagian sarana angkutan umum yang ada dinilai sudah mulai termakan usia, sehingga aspek kenyamanan menjadi salah satu alasan utama menurunnya daya tarik bagi calon penumpang.

**Dampak:** Rendahnya *Load Factor* (angka keterisian) ini berisiko mematikan ekonomi sektor transportasi lokal dan meningkatkan beban biaya hidup masyarakat akibat ketergantungan pada kendaraan pribadi dan BBM.

Keselamatan jalan tetap menjadi prioritas yang belum sepenuhnya tuntas. Isu ini dipicu oleh beberapa variabel utama di wilayah Balangan:

- **Pelanggaran Dimensi dan Muatan (ODOL):** Mengingat Balangan merupakan jalur perlintasan logistik dan pertambangan, pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) masih kerap ditemukan. Hal ini tidak hanya merusak infrastruktur jalan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan fatal bagi pengguna jalan lain.

- **Minimnya Kesadaran Berkendara:** Pelanggaran administratif (surat kendaraan) maupun teknis (penggunaan helm, lampu, dan sabuk pengaman) mencerminkan budaya tertib lalu lintas yang masih rendah di sebagian lapisan masyarakat.
- **Geografis dan Sarana Prasarana:** Kontur jalan yang beragam di Kabupaten Balangan, jika tidak dibarengi dengan perlengkapan jalan yang memadai (marka, rambu, dan penerangan jalan umum), menjadi titik rawan kecelakaan (*blackspot*).

Mandat utama Dishub Kabupaten Balangan berakar pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No. 37 Tahun 2011. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan ini difokuskan pada :

- **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:** Pengaturan arus kendaraan pada jalan kabupaten untuk memastikan efisiensi pergerakan.
- **Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Keselamatan:** Pemasangan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan penerangan jalan umum (PJU).
- **Pengawasan Angkutan Umum dan Barang:** Pengaturan trayek lokal dan pengawasan dimensi/muatan kendaraan (ODOL) yang berpotensi merusak infrastruktur jalan.

Peran Strategis dalam Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas bukan hanya soal membangun jalan (yang merupakan ranah Dinas PUPR), melainkan bagaimana jalan tersebut berfungsi sebagai sistem transportasi yang terintegrasi. Peran Dishub Balangan meliputi :

- Integrasi Moda dan Simpul Transportasi, Dishub bertanggung jawab mengelola simpul transportasi seperti Terminal Paringin dan halte-halte di wilayah kecamatan. Konektivitas dianggap berhasil jika penduduk dari wilayah

pelosok (seperti Halong atau Tebing Tinggi) dapat mencapai pusat layanan publik di Paringin dengan kepastian waktu dan biaya.

- Keselamatan sebagai Penunjang Aksesibilitas, Infrastruktur jalan yang dibangun PUPR tidak akan memberikan konektivitas yang optimal tanpa kelengkapan keselamatan. Dishub wajib memastikan koridor-koridor utama memiliki:

- Pagar pengaman jalan (guardrail) di area perbukitan Balangan.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mendukung konektivitas logistik 24 jam.

### **Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Dalam rangka mencapai salah satu sasaran, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai hal dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan seperti memperbaiki dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Dalam hal pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah memiliki Alat Pengujian sesuai standar Kementerian Perhubungan sebagai salah satu syarat akreditasi yang menunjukkan bahwa Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang kita miliki dapat melaksanakan pelayanan. Di samping itu, dalam hal pelayanan Dinas Perhubungan telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan antara lain :

1. SOP penerbitan surat keterangan bebas uji berkala
2. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali (Baru)
3. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala
4. SOP surat rekomendasi mutasi keluar
5. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi masuk
6. SOP penanganan pengaduan
7. SOP Mekanisme tidak lulus uji
8. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan bermotor
9. SOP surat rekomendasi numpang uji keluar
10. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang uji masuk

11. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Rubah Sifat Kendaraan Bermotor
12. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Daerah
13. SOP Pelayanan Perparkiran
14. SOP Rekomendasi Andalalin
15. SOP. Penanganan Pengaduan Penerangan Jalan

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika Laporan LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD, isu-isu strategis serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja organisasi, dan Realisasi Anggaran, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2025
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Cascading terbaru dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/811 /Kum TAHUN 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Dalam rencana strategis 2025 - 2029 disebutkan, Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2025–2029 adalah :

*“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”*

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2025-2029) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2025–2029, yaitu pada Misi I :

*“Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”*

Selanjutnya, dalam Renstra Penyesuaian Dinas Perhubungan juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025, yaitu **“Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Perhubungan pada akhir periode perencanaan (tahun 2029). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah

### B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Program sebagai berikut :

| Program   | Anggaran (Rp)              |
|---|----------------------------|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Rp13.695.585.567,00        |
| Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rp47.528.393.614,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp61.223.979.181,00</b> |

*Tabel 2. 1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025*

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Balangan sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2025

| No. | SASARAN STRATEGIS                              | INDIKATOR   | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Persentase Load Factor (%)                            | 105,9  |
| 2   | Meningkatnya Keselamatan Transportasi          | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten (%) | 99,99  |

*Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2025*

**C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025**

Indikator Kineja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2029  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

| No. | KINERJA UTAMA<br>(SASARAN STRATEGIS)   | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                       | MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN<br>ATAU PENJELASAN   | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER DATA                                |
|-----|--|--|---|---------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                   | 6  |
| 1   | <p><b>Sasaran Strategis :</b><br/>Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi</p> | <p>Persentase Load Factor (kapasitas muatan)</p> | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perlu dilakukan perhitungan load factor terhadap jaringan trayek serta kebutuhan kendaraan angkutan. Standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk nilai load factor adalah 70% dan terdapat cadangan 30% untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih dapat diterima</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan salah satu parameter yang digunakan adalah load factor. Load factor dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang sudah ada mencukupi, masih kurang, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b><br/>Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan X 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b><br/>Analisa Mandiri</p> | <p>Kepala Dinas</p> | <p>Laporan Kegiatan Pelayanan Angkutan</p> |

| No. | KINERJA UTAMA<br>(SASARAN STRATEGIS)                                | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                        | MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN<br>ATAU PENJELASAN   | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER DATA  |
|-----|---|---|---|---------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                   | 6  |
| 2   | <b>Sasaran Strategis :</b><br>Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten | <p><b>Makna Indikator :</b><br/>Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b><br/>Untuk mengutamakan efektifitas dan efisiensi keselamatan transportasi</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b><br/>Jumlah Kejadian Kecelakaan dibagi 10.000 keberangkatan</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b><br/>PMDN Nomor 17 Tahun 2021</p> | Kepala Dinas        | Hasil koordinasi bersama SATLANTAS POLRES Balangan |

*Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2029 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan*

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Perhubungan pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun Pertama Renstra Dinas Perhubungan 2025 – 2029.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Menetapkan Kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi wajib menyusun Laporan Kinerja dengan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Di dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terlebih dahulu suatu Instansi Pemerintah membuat suatu pernyataan perjanjian kinerja sebagai komitmen dari Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Di dalam penetapan perjanjian kinerja telah dijabarkan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan yang terwujud dalam suatu target pencapaian yang kuantitatif agar dapat dinilai tingkat keberhasilan dari masing-masing sasaran.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 memiliki 2 (Dua) Sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran yang sudah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa dari 2 (Dua) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Tinggi dengan capaian 100%.

### A.1 Sasaran 1 Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis  
Tahun 2025**

| Sasaran Strategis 1 :<br>Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi |   |  |                |                   |                 |                              |
|---|---|--|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| NO  | Indikator Kinerja Utama                             |  | Target<br>2025 | Realisasi<br>2025 | Capaian<br>2025 | Capaian<br>2025 thdp<br>2024 |
| 1   | Persentase <i>Load Factor</i><br>(Kapasitas Muatan) |  | 108,10 %       | 107,22 %          | 115,318%        | Sangat<br>Tinggi             |

*Tabel 3. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025*

sumber data : Dinas Perhubungan 2025

Target Persentase Persentase *Load Factor* pada tahun 2025 adalah 108,10% dengan realisasi sebesar 107,22%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 115,318%. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun  
Sebelumnya**

**Indikator : Persentase *Load Factor***

| NO | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja             | Target 2025 | Realisasi 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|----|--|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Persentase <i>Load Factor</i> | 108,10 %    | 107,22 %       | 113,91%        | 137%           | #NA            |

*Tabel 3. 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun  
Sebelumnya*

sumber data : Dinas Perhubungan 2025

Target Persentase Persentase *Load Factor* pada tahun 2025 adalah 108,10% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 107,22%, realisasi tahun 2024 adalah 113,91%, realisasi tahun 2023 adalah 137%, dan realisasi tahun 2022 masih tidak tersedia karena belum termasuk dalam target Perencanaan.

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra dengan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi). Yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra  
Indikator : Persentase *Load Factor***

| No | SASARAN STRAGIS                                | INDIKATOR                     | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) |
|----|--|-------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Persentase <i>Load Factor</i> | 100%                 | 107,21%        | 93,27%      |

*Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra*

sumber data : Dinas Perhubungan 2025

Capaian 2025 untuk Indikator Kinerja Persentase *Load Factor* adalah 107,21% terhadap target akhir Renstra sebesar 100% dengan capaian kinerja 2025 terhadap target akhir Renstra sebesar 93,27%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten  
 Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional  
 Indikator: Persentase *Load Factor*

| No | SASARAN  | INDIKATOR              | REALISASI TAHUN 2025 Kab Balangan | TARGET KAB.TABALONG | TARGET PROVINSI | TARGET NASIONAL | TARGET INTERNASIONAL | CAPAIAN KAB.TABALONG | CAPAIAN PROVINSI | CAPAIAN NASIONAL | CAPAIAN INTERNASIONAL |
|----|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Persentase Load Factor | 107,21 %                          | #na                 | 90%             | 100%            |                      | #na                  | 81%              | 100%             |                       |

*Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten  
 Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional*

Untuk sasaran Meningkatkan kinerja layanan moda transportasi dengan indikator Persentase *Load Factor* untuk tahun 2025 capaiannya di Kabupaten Balangan 107,21%.

Sedangkan perbandingan capaian Persentase *Load Factor* kabupaten Balangan dengan provinsi Kalimantan selatan adalah 107,21 % berbanding 81% artinya *Load factor* Angkutan Darat di Kabupaten Balangan adalah masih sangat Padat penumpangnya dibandingkan dengan Angkutan Provinsi Kalimantan Selatan, ini juga berarti Jumlah Armada tidak seimbang dengan penumpang yang ada, tidak seperti di Provinsi Kalimantan selatan yang jumlah dan jenis Armada angkutannya sudah mencukupi.

Berdasarkan tabulasi data sebagaimana tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4, analisa yang dapat kami sajikan adalah sebagai berikut :

**1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator: Persentase *Load Factor*)**

**Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.1 *Load Factor*** dalam konteks angkutan merujuk pada tingkat penggunaan kapasitas kendaraan atau moda transportasi dibandingkan dengan kapasitas maksimum yang dapat diangkut oleh kendaraan tersebut dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya, ini mengukur seberapa efisien sebuah moda transportasi dalam mengangkut penumpang atau barang.

Tujuan pengukuran *Load Faktor* adalah untuk mengetahui Efisiensi Operasional: *Load factor* digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah sistem transportasi menggunakan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi *load factor*,

semakin efisien sistem transportasi tersebut. Perencanaan Layanan: *Load factor* yang rendah dapat menunjukkan kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah armada atau frekuensi layanan. Sementara *load factor* yang tinggi dapat menunjukkan perlunya menambah kapasitas untuk menghindari overloading. Penilaian Kinerja: *Load factor* juga digunakan untuk menilai kinerja angkutan dalam mengoptimalkan penggunaan aset (seperti bus), serta dalam pengelolaan biaya dan pendapatan.

Realisasi indikator kinerja Persentase *Load Factor* (kapasitas muatan) pada tahun 2025 adalah 107,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 108,10% sehingga capaian kinerja adalah 100,82%. Realisasi sebesar 107,21% merupakan hasil pembagian dari Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan.

Pada tahun 2025 jumlah penumpang yang ditargetkan adalah sebanyak 223 orang dengan target kapasitas muatan sebanyak 208 orang.

Untuk target kapasitas muatan sebanyak 208 orang disesuaikan berdasarkan armada angkutan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Pada Tahun 2025 armada angkutan yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 17 (tujuh belas) unit diantaranya:

- Mobil APV sebanyak 11 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 8 orang (jumlah 88 orang)
- Mobil ELF sebanyak 4 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 17 orang (jumlah 68 orang)
- Bis sebanyak 2 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 26 orang (jumlah 52 orang)

Sehingga jumlah total kapasitas muatan sebanyak 208 orang

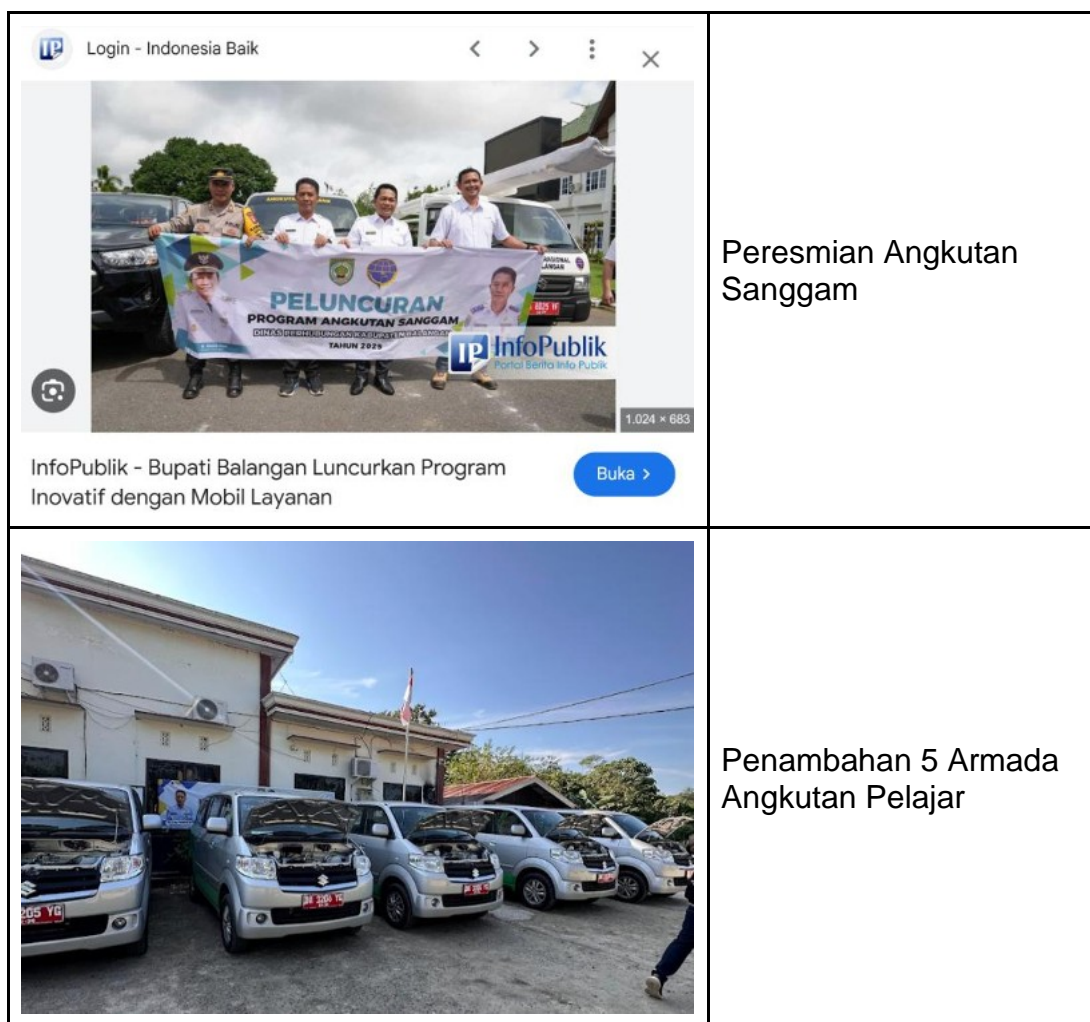
Untuk jumlah penumpang yang dilayani Dinas Perhubungan pada tahun 2025 adalah:

- Mobil APV sebanyak 11 unit dengan jumlah penumpang per unit sebanyak 11 orang (jumlah 99 orang)
- Mobil ELF sebanyak 4 unit dengan kapasitas muatan per unit ada 18 dan 18 orang (jumlah 72 orang)
- Bis sebanyak 2 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 26 orang (jumlah 52 orang)

Sehingga total jumlah penumpang sebanyak 223 orang

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase *Load Factor* (kapasitas muatan) pada tahun 2025 belum tercapai karena idealnya persentase *Load Factor* itu adalah 100% artinya jumlah angkut dan daya angkut itu sebanding. Capaian tahun 2025 ini menggambarkan masih ada kapasitas muatan yang berlebih. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan untuk mengurangi kesesakan tersebut diantaranya pada tahun 2025 telah mengadakan tambahan Mobil Armada jenis APV sebanyak 5 buah sehingga total Armada APV ada 11 unit dan 3 unit dioperasikan untuk Armada Angkutan pelajar dan Angkutan Sanggam (Gratis sagan Masyarakat) 3 unit pada awal tahun Januari 2025 dengan rute Paringin - Halong, Paringin-Lampihong dan Paringin-Tebing tinggi, kemudahan membuat kebijakan dua kali angkut pada trayek tertentu dan membuat jadwal angkut lebih pagi.

### Dokumentasi Penambahan Armada Angkutan



Gambar 3. 1 Dokumentasi Penambahan Armada Angkutan

Beberapa **faktor yang menyebabkan tercapainya** indikator persentase *load factor* diantaranya : Dukungan regulasi, kebijakan dan anggaran dari Pemerintah Daerah terhadap penyediaan sarana angkutan, adanya SOP pelayanan angkutan, posisi geografis kabupaten balangan yang berada dijalur tengah dan dikelilingi kabupaten kota lainnya.

Beberapa **faktor penghambat** diKabupaten Balangan adalah, Tidak adanya Penyediaan Angkutan oleh Pihak Swasta, Angkutan umum yang diselenggarakan oleh pihak swasta berperan besar dalam menghubungkan berbagai daerah di Kabupaten Balangan. Namun, ketidakterediaan layanan angkutan oleh pihak swasta mengurangi jumlah pilihan transportasi yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini berpotensi menurunkan persentase *Load Factor*, yang seharusnya mencerminkan tingkat pemanfaatan kapasitas kendaraan yang optimal. Tanpa keterlibatan swasta, kapasitas angkutan yang ada menjadi terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan transportasi yang berkembang di daerah.

Kabupaten Balangan memiliki karakteristik wilayah demografi yang relatif kecil (kecamatan terjauh berjarak kurang lebih 30km), dan lebar jalan yang relatif kecil yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian *Load Factor* yang optimal. Jangkauan angkutan umum yang terbatas dalam wilayah yang kecil tersebut mungkin tidak seefisien di daerah yang lebih luas atau padat. Selain itu, distribusi dan lokasi pemukiman yang tersebar dapat membuat beberapa wilayah sulit dijangkau dengan angkutan umum yang terbatas, menyebabkan kapasitas kendaraan tidak terisi penuh. Ini berpengaruh langsung pada rendahnya *Load Factor*.

Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan angkutan yang lebih terjangkau dan efisien. Selain itu, perencanaan transportasi yang lebih baik dan penyesuaian layanan angkutan dengan kebutuhan masyarakat setempat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki *Load Factor* di Kabupaten Balangan.

Untuk perhitungan realisasi dan capaian Persentase *Load Factor* tahun 2025 dapat dilihat pada table di bawah ini :

### Persentase Load Factor

| Tahun | Daya Tampung | Jumlah Tampung | LF      |
|-------|--------------|----------------|---------|
| 2021  | 161          | 197            | 122,4%  |
| 2022  | 135          | 185            | 137,0%  |
| 2023  | 135          | 185            | 137,0%  |
| 2024  | 151          | 172            | 113,91% |
| 2025  | 208          | 232            | 107,21% |

Tabel 3. 5 Persentase Load Factor tahun 2025

#### Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.2

Secara garis besar, tabel ini menunjukkan dinamika tingkat keterisian moda transportasi yang sangat tinggi, namun cenderung mengalami normalisasi dalam tiga tahun terakhir. Berikut adalah analisisnya :

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan menetapkan target *Load Factor* sebesar 108,10%. Realisasi yang tercapai adalah 107,21%. Tingkat Capaian : Meskipun secara angka riil sedikit di bawah target (selisih 0,88%), angka di atas 100% menunjukkan bahwa permintaan layanan transportasi di Balangan masih sangat tinggi, bahkan melebihi kapasitas ideal rata-rata yang ditetapkan. Tren Penurunan (Deselerasi) yang Sehat Jika melihat data historis, terjadi tren penurunan persentase yang konsisten :

- Tahun 2023 : Mencapai angka fantastis 137%. Angka ini mengindikasikan kondisi *overload* atau penumpukan penumpang/barang yang sangat ekstrem.
- Tahun 2024 : Turun menjadi 113,91%.
- Tahun 2025 : Menjadi 107,21%.

Penurunan ini tidak selalu berarti kinerja memburuk. Sebaliknya, ini bisa mengindikasikan keberhasilan penyediaan armada tambahan atau perbaikan jadwal, sehingga penumpukan penumpang (yang tercermin dari angka 137%) mulai terurai menuju titik keseimbangan yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna jasa.

Indikator ini mendukung sasaran strategis : "*Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi*". Dengan realisasi yang stabil di angka 107%, Pemkab Balangan

berarti berhasil menjaga utilitas kendaraan tetap tinggi (tidak ada armada yang berjalan kosong), yang berarti layanan transportasi secara ekonomi sangat efisien dan berkelanjutan. Data ini menggambarkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki permintaan transportasi yang sangat kuat. Lonjakan pada tahun 2023 (137%) dikarenakan masih keterbatasan armada. Namun, langkah kebijakan di tahun 2024 dan 2025 berhasil membawa angka tersebut ke level yang lebih terkendali (107,21%), yang mendekati target ideal pemerintah daerah.

Angka *Load Factor* di atas 100% secara teknis berarti rata-rata keterisian melebihi kapasitas kursi/ruang yang tersedia dalam periode tertentu (bisa karena perputaran penumpang yang cepat dalam satu rute).

### **Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.3**

Secara garis besar, tabel ini menunjukkan Capaian Kurang dari 100%: Meskipun realisasinya 107,21%, angka "Capaian" tercatat sebesar 93,27%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam indikator *Load Factor*, angka yang lebih tinggi tidak selalu dianggap lebih baik.

Dalam dunia transportasi, *Load Factor* yang melebihi 100% biasanya berarti terjadi "overcapacity" (kelebihan muatan) yang bisa menurunkan kenyamanan atau standar keamanan layanan. Oleh karena itu, efektivitas kinerjanya dihitung berdasarkan seberapa dekat realisasi dengan titik ideal (100%), bukan seberapa jauh melampauinya.

Hal ini menggambarkan :

1. Efektivitas Layanan moda transportasi pada tahun 2025 sangat diminati (sangat produktif), bahkan cenderung melebihi kapasitas yang direncanakan.
2. Terdapat selisih sebesar 6,73% (100% - 93,27%) untuk mencapai target akhir tahun Renstra.
3. Angka capaian 93,27% mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitas target terlampaui (107%), secara kualitas pelayanan masih ada ruang evaluasi agar beban transportasi tetap berada pada titik optimal (tidak kurang, namun juga tidak terlalu sesak).

### **Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.4**

Perbandingan capaian Persentase Load Factor dengan daerah lain :

- Terhadap Kabupaten Sekitar (Kabupaten Tabalong) : data tidak tersedia karena tidak menjadi target daerah.

- Terhadap Target Provinsi: Realisasi Kabupaten Balangan (107,21%) telah melampaui target yang ditetapkan oleh Provinsi (90%).
- Terhadap Target Nasional: Realisasi Kabupaten Balangan juga telah melampaui standar target Nasional (100%).

Meskipun realisasi angkanya tinggi, tingkat "Capaian" dihitung berdasarkan efektivitas pencapaian target tersebut :

- Capaian terhadap Nasional : Kabupaten Balangan mencapai angka 100%. Ini menunjukkan bahwa kinerja layanan moda transportasi di Balangan telah sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan nasional.
- Capaian terhadap Provinsi : Tercatat sebesar 81%. Ada selisih efektivitas jika dibandingkan dengan standar parameter provinsi.

Kesimpulan Analisis

- Tingkat Okupansi Tinggi : Angka realisasi 107,21% menunjukkan bahwa moda transportasi di Kabupaten Balangan beroperasi di atas kapasitas maksimalnya (*overcapacity*).
- Daya Saing Wilayah : Dibandingkan dengan target-target eksternal, Kabupaten Balangan menunjukkan performa pemanfaatan transportasi yang sangat agresif. Namun, realisasi yang melebihi 100% biasanya mengindikasikan perlunya penambahan armada atau frekuensi layanan untuk menjaga kenyamanan penumpang agar kembali ke titik ideal (100%).
- Kekosongan Data: Tabel tidak menyediakan data pembandingan untuk Target Kabupaten Tabalong (dalam kolom tersebut kosong) dan Target Internasional, sehingga posisi Balangan terhadap dua kategori tersebut tidak dapat dianalisis.

## 2. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator: *Load Factor*)

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang ada dan anggaran Tahun 2025, terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi dengan indikator Persentase Load Factor. Berikut keterkaitan program tersebut

### Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

| No | SASARAN STRATEGIS                              | PROGRAM/KEGIATAN   | ALASAN   |
|----|--|--|--|
| 1  | Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dengan adanya penyediaan angkutan umum yang resmi dan terjadwal, masyarakat memiliki kepastian moda transportasi, yang secara langsung meningkatkan jumlah pengguna (menaikkan <i>load factor</i> ). |

*Tabel 3.6 Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Berikut analisis gambaran atas Program Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Persentase Load Factor diantaranya :

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan yang utamanya adalah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dukungan kebijakan dan pemenuhan anggaran. Kebijakan yang terfokus pada kegiatan penyediaan angkutan umum antar kota dalam satu kabupaten memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat serta standarisasi layanan (SOP). Kemudian Pengaruh Pemenuhan Anggaran yang memadai dalam Program Penyelenggaraan LLAJ berkontribusi langsung terhadap Operasional Armada / Angkutan Masyarakat, dengan anggaran yang terpenuhi, frekuensi kendaraan dapat dijaga untuk tetap melayani rute-rute gemuk, yang menjelaskan mengapa angka realisasi mencapai **107,21%** (kondisi di mana angkutan umum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat).

Dan pada tahun 2025 juga ada penambahan armada angkutan sebanyak 5 unit untuk menambah total ketersediaan jumlah angkutan.

Dari program tersebut, Dinas Perhubungan juga telah melakukan crosscutting kinerja dengan beberapa SKPD yang terlibat untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun matrik crosscutting kinerja dan monev crosscutting kinerja adalah sebagai berikut :

### Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro)

| Kinerja  | Ke OPD  | Dukungan Kinerja  |
|--|---|---|
| Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Daerah                   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN  | (L:5) Terbangunnya Jalan<br>(L:5) Terlaksananya Pembangunan Bangunan/Gedung                                 |
| Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | (L:5) Terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa   |
| Meningkatnya Layanan Penyelenggaraan Angkutan Umum               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | (L:5) Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan   |
| Tersedianya Angkutan Umum dalam Kabupaten                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | (L:5) Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan   |
| Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   | (L:5) Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau |

Tabel 3. 7 Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro)

Berdasarkan tabulasi data crosscutting kinerja di atas untuk sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Moda Transportasi dengan indikator Persentase *Load Factor* adalah dengan OPD Dinas Pendidikan dan kebudayaan terkait angkutan pelajar, dengan dukungan kinerja Terlaksananya Kegiatan belajar mengajar siswa.

Keberhasilan indikator Persentase *Load Factor* sebesar 107,21% tidak terlepas dari peran angkutan pelajar sebagai kontributor utama keterisian penumpang.

- Dinas Perhubungan sebagai Penyedia Layanan: Bertanggung jawab dalam Program Penyelenggaraan LLAJ, khususnya penyediaan armada angkutan orang dalam satu daerah kabupaten.
- Dinas Pendidikan sebagai Basis Pengguna: Memberikan dukungan kinerja melalui "Terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa," yang menciptakan permintaan tetap terhadap layanan transportasi setiap hari sekolah

### Monev Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro)

| Kinerja  | Ke OPD                          | Dukungan Kinerja                                    | Evaluasi   |        |           |             |     |     |     |        |           |             |    |    |     |
|--|---------------------------------|---|--|--------|-----------|-------------|-----|-----|-----|--------|-----------|-------------|----|----|-----|
| Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | (L:5) Terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa | <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)</p> <table border="1"> <tr> <td>TARGET</td> <td>REALISASI</td> <td>CAPAIAN (%)</td> </tr> <tr> <td>528</td> <td>528</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)</p> <table border="1"> <tr> <td>TARGET</td> <td>REALISASI</td> <td>CAPAIAN (%)</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>78</td> <td>100</td> </tr> </table> | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | 528 | 528 | 100 | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | 78 | 78 | 100 |
| TARGET   | REALISASI                       | CAPAIAN (%)   |  |        |           |             |     |     |     |        |           |             |    |    |     |
| 528  | 528                             | 100   |  |        |           |             |     |     |     |        |           |             |    |    |     |
| TARGET   | REALISASI                       | CAPAIAN (%)   |  |        |           |             |     |     |     |        |           |             |    |    |     |
| 78   | 78                              | 100   |  |        |           |             |     |     |     |        |           |             |    |    |     |

Tabel 3. 8 Monev Crosscutting Kinerja (sesuai Aplikasi e-Sakip Pro)

Tabel Monev crosscutting diatas berkaitan tentang kinerja dalam upaya pencapaian Persentase *Load Factor* di Kabupaten Balangan. Keberhasilan indikator *Load Factor* memiliki keterkaitan erat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyediaan angkutan pelajar :

- Dukungan Kinerja Pendidikan: Terlaksananya kegiatan belajar mengajar siswa menjadi faktor pendorong utama (*demand*) bagi layanan transportasi.
- Indikator Output Pendidikan: Sektor pendidikan mencatatkan keberhasilan 100% pada jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar.
- Sinergi Operasional :
  - Tingginya realisasi *load factor* (107,21%) merupakan dampak langsung dari mobilisasi pelajar yang memanfaatkan angkutan umum untuk menuju sekolah secara rutin.
  - Kolaborasi ini menjamin keamanan transportasi bagi siswa sekaligus mengoptimalkan keterisian kursi pada armada angkutan daerah.

Capaian kinerja transportasi di Kabupaten Balangan tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat kuat, didukung oleh kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan sinergi yang solid dengan sektor pendidikan. Angka realisasi yang melebihi 100% menjadi bukti nyata bahwa layanan angkutan umum daerah sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya para pelajar.

### **3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator: Persentase *Load Factor*)**

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Persentase *Load Factor* Tahun 2025 diantaranya Efisiensi dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp. 933.368.300 realisasi sebesar Rp. 757.201.712 menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 18,87 %.

Pencapaian ini menggambarkan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan berhasil membuktikan bahwa dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang tepat, target kinerja nasional dapat terlampaui bahkan dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari perencanaan semula. Hal ini

memperkuat posisi Kabupaten Balangan dalam efektivitas penyelenggaraan angkutan umum untuk pencapaian target Persentase *Load Factor*.

## A.2 Sasaran 2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi (Indikator : Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah)

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

| Sasaran Strategis 2 :<br>Meningkatnya Keselamatan Transportasi |   |  |             |                |              |                        |
|--|---|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| NO   | Indikator Kinerja Utama                 |  | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Capaian 2025 thdp 2024 |
| 1  | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah |  | 99,99%      | 100%           | 100%         | Sangat Tinggi          |

**Tabel 3. 9** Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025  
sumber data : Dinas Perhubungan 2025

Target Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah pada tahun 2025 adalah 99,99% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang disajikan pada tabel di bawah ini :

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Indikator : Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah

| NO | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                       | Target 2025 | Realisasi 2025 | Realisasi 2024 | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|----|---------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah | 99,99%      | 100 %          | #na            | #na            | #na            |

**Tabel 3. 10** Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya  
sumber data : Dinas Perhubungan 2025

Indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah merupakan indikator baru, jadi perhitungan realisasinya tidak teredia.

Meskipun tidak memiliki data pembandingan dari tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 akan menjadi tolok ukur krusial bagi Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah untuk melakukan pembenahan transportasi secara komprehensif, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa penuh kendaraan terisi (100% Capaian Nasional), tetapi juga dari seberapa aman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra dengan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi). Yang disajikan pada tabel di bawah ini :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra  
Indikator : Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah**

| No | SASARAN STRAGIS                       | INDIKATOR                               | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI 2025 | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|
| 1  | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah | 99%                  | 100%           | 100%        |

*Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra*

*sumber data : Dinas Perhubungan 2025*

Capaian 2025 untuk Indikator Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah adalah 100% terhadap target akhir Renstra sebesar 100 %. Realisasi fisik sebesar 100% secara langsung melampaui ambang batas target akhir yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 99%. Pencapaian angka sempurna (100%) menunjukkan bahwa program keselamatan transportasi daerah pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat efektif sesuai standar baku yang direncanakan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten  
Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional**

**Indikator: Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah**

| No | SASARAN                               | INDIKATOR                               | REALISASI TAHUN 2025 Kab Balangan | TARGET KAB.TABALONG | TARGET PROVINSI | TARGET NASIONAL | TARGET INTERNASIONAL | CAPAIAN KAB.TABALONG | CAPAIAN PROVINSI | CAPAIAN NASIONAL | CAPAIAN INTERNASIONAL |
|----|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah | 100%                              | 90%                 | 99,99%          | 99,99%          | -                    | 100%                 | 81%              | 100%             | -                     |

*Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Kabupaten  
Tabalong/Provinsi/Nasional/Internasional*

Berdasarkan data pada tabel terbaru, berikut adalah analisis perbandingan realisasi kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 terhadap target daerah lain (Kabupaten Tabalong, Provinsi, dan Nasional).

Terhadap Target Kabupaten Tabalong: Realisasi Kabupaten Balangan (100%) melampaui target Kabupaten Tabalong yang ditetapkan sebesar 90%. Terhadap Target Provinsi & Nasional: Realisasi Kabupaten Balangan (100%) juga berhasil melampaui target tingkat Provinsi dan Nasional yang dipatok pada angka 99,99%.

**2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Indikator : Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah)**

**Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.9**

Indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota adalah parameter yang mengukur sejauh mana penyelenggaraan jasa angkutan umum (orang) dan angkutan barang terbebas dari risiko kecelakaan fatal selama beroperasi di wilayah hukum Kabupaten/Kota dalam periode satu tahun. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan kelaikan kendaraan (*ramp check*), penyediaan prasarana jalan yang aman, serta pembinaan terhadap operator angkutan.

Untuk sasaran strategis “*Meningkatnya Keselamatan Transportasi*” capaiannya sebesar 100%. Dan indikatornya ini merupakan Indikator baru yang

ditetapkan sehingga data awal 2024 merupakan data perkiraan. Dari target yang ingin di capai di tahun 2025, Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota adalah 99,99% merujuk dari data target dalam Rakortek 2025, dan berdasarkan perhitungan mandiri capaiannya adalah 100 % artinya tidak ditemukannya kecelakaan angkutan umum dan barang di tahun 2025 dalam kabupaten balangan.

**Faktor Pendorong dan Penghambat** : Salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya kecelakaan di Kabupaten Balangan adalah kondisi jalan yang berlubang dan tidak terawat dengan baik. Jalan yang rusak, terutama yang berlubang, dapat menjadi penyebab utama kecelakaan karena dapat mengganggu kestabilan kendaraan, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, atau bahkan menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menambah beban dan memperburuk kualitas jalan yang ada. Kendaraan ODOL seringkali membawa beban berlebih yang dapat merusak jalan lebih cepat, dan ketika kendaraan besar tersebut melintas di jalan yang tidak terawat, maka risiko kecelakaan semakin meningkat.

Selain faktor infrastruktur, tingkat kecelakaan yang tinggi juga disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, serta kebiasaan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, mempercepat terjadinya kecelakaan. Pengemudi yang tidak berhati-hati, misalnya yang tidak memperhatikan kondisi jalan yang buruk atau yang melaju dengan kecepatan tinggi meskipun jalan tidak dalam kondisi baik, akan sangat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Pelanggaran seperti angkutan melebihi muatan, tidak memakai helm, melawan arus, tidak mengenakan sabuk pengaman, atau mengemudi dalam pengaruh alkohol, juga merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Untuk menurunkan angka kecelakaan, perlu adanya perbaikan kondisi jalan, penambahan serta pemeliharaan faskes dan penertiban kendaraan ODOL, serta peningkatan kesadaran dan disiplin pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh pengguna jalan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan jalan, ada beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya :

1. Dinas perhubungan telah seoptimal mungkin mengalokasikan anggaran untuk penambahan fasilitas keselamatan jalan (perlengkapan jalan) diantaranya :

- Pada APBD Perubahan Tahun 2025 telah dilaksanakan pengadaan perlengkapan jalan berupa :

| N o.      | Nama Paket/<br>Pekerjaan   | Pagu             | Nilai Kontrak    | Volume    |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------|
| APBD 2025 |  |                  |                  |           |
| 1         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan Halong                       | Rp 2.821.500.000 | Rp 2.820.015.000 | 297 U nit |
| 2         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan Paringin                     | Rp 2.821.500.000 | Rp 2.820.015.000 | 297 U nit |
| 3         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan A Yani                       | Rp 960.000.000   | Rp 959.200.000   | 80 U nit  |
| 4         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Median Jalan                            | Rp 3.960.000.000 | Rp 3.949.200.000 | 72 U nit  |
| 5         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart System               | Rp 3.540.000.000 | Rp 3.519.350.000 | 59 U nit  |
| 6         | Pengadaan dan pemasangan PJU Tenaga Surya Pedesaan                   | Rp 550.000.000   | Rp 546.700.000   | 22 U nit  |
| 7         | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang Siku | Rp 1.960.000.000 | Rp 1.956.220.000 | 28 U nit  |

|    |   |                     |                        |                 |
|----|---|---------------------|------------------------|-----------------|
| 8  | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang lurus         | Rp<br>120.000.000   | Rp<br>119.625.000      | 3<br>U<br>nit   |
| 9  | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Tiang Lengkung      | Rp<br>540.000.000   | Rp<br>538.605.000      | 9<br>U<br>nit   |
| 10 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan Lampihong                             | Rp<br>3.743.000.000 | Rp<br>3.737.090.000,00 | 394<br>U<br>nit |
| 11 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan Awayan dan Tebing Tinggi              | Rp<br>2.983.000.000 | Rp<br>2.978.290.000,00 | 314<br>U<br>nit |
| 12 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tiang Mandiri                                    | Rp<br>4.884.000.000 | Rp<br>4.869.200.000,00 | 296<br>U<br>nit |
| 13 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Kawasan Pejalan Kaki                             | Rp<br>1.850.000.000 | Rp<br>1.835.200.000    | 74<br>U<br>nit  |
| 14 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Ruas Jalan Batumandi                             | Rp<br>3.847.500.000 | Rp<br>3.841.425.000,00 | 405<br>U<br>nit |
| 15 | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tiang Mandiri Batumandi - Awayan - Tebing Tinggi | Rp<br>2.970.000.000 | Rp<br>2.961.000.000,00 | 180<br>U<br>nit |
| 16 | Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan  | Rp<br>420.000.000   | Rp<br>419.400.000,00   | 1200<br>M<br>2  |
| 17 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas                                    | Rp<br>110.000.000   | Rp<br>109.680.000      | 40<br>U<br>nit  |

|            |  |                     |                     |           |
|------------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 18         | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)                                 | Rp<br>140.000.000   | Rp 139.560.000      | 8<br>Unit |
| 19         | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Pengguna Jalan/Guardrail Ruas Jalan Awayan-Tebing Tinggi | Rp<br>104.000.000   | Rp 103.200.000      | 40        |
| APBDP 2025 |  |                     |                     |           |
| 20         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart Ruas Jalan Bihara-Mayanau                        | Rp<br>3.000.000.000 | Rp<br>2.983.750.000 | 50 Unit   |
| 21         | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart Ruas Jalan Mantimin - Lampihong                  | Rp<br>9.180.000.000 | Rp<br>9.130.275.000 | 153 unit  |
| 22         | Pengadaan Dan Pemasangan PJU Median Jalan Komp Perkantoran Maritam                               | Rp<br>770.000.000   | Rp<br>767.900.000   | 14 unit   |
| 23         | Pengadaan Dan Pemasangan PJU Konvensional Paringin   | Rp<br>603.000.000   | Rp<br>600.000.000   | 60 unit   |
| 24         | Pengadaan Dan Pemasangan PJU Konvensional Ruas Jalan Lingkar Timur                               | Rp<br>1.683.000.000 | Rp<br>1.575.900.000 | 102 unit  |

|                      |   |                         |                         |            |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| 25                   | Pengadaan Dan Pemasangan PJU Konvensional Ruas Jalan Muara Jaya - Mayanau       | Rp<br>1.431.500<br>.000 | Rp<br>1.400.000.<br>000 | 140 unit   |
| 26                   | Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya 40 W                                  | Rp<br>3.788.200<br>.000 | Rp<br>3.783.500.<br>000 | 94 unit    |
| 29                   | Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Pengguna Jalan Ruas Jalan Lingkar Timur | Rp<br>435.960.0<br>00   | Rp<br>433.440.0<br>00   | 126 meter  |
| Belanja Pemeliharaan |   |                         |                         |            |
| 30                   | Upgrade Jaringan Lampu PJU Median Jalan A. Yani                                 | Rp<br>2.070.000<br>.000 | Rp<br>2.070.000.<br>000 | 3000 meter |
| 31                   | Upgrade Lampu PJU Median Jalan A. Yani  | Rp<br>1.813.500<br>.000 | Rp<br>1.813.500.<br>000 | 186 unit   |

*Tabel 3. 13 Rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan*

Total Pengadaan : **4.340 Unit Pengadaan Perlengkapan jalan**

2. Dinas Perhubungan juga telah mengakomodir penyediaan alat uji kendaraan bermotor agar pelayanan Uji Kendaraan Bermotor dapat maksimal. Pada APBD Tahun 2025 telah dilakukan pengadaan :
  - Alat Uji Rem
  - Aplikasi SIM PKB Full Cycle
  - Axle Play
3. Dinas Perhubungan bersinergi dengan POLRES Balangan di dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan aturan ODOL (Over Dimensi Over Load).
4. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye keselamatan kepada masyarakat tentang ZERO ODOL (Over Dimensi Over Load).

### **Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.10**

Indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah merupakan indikator baru, jadi perhitungan realisasinya tidak teredia.

Meskipun tidak memiliki data pembandingan dari tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 akan menjadi tolok ukur krusial bagi Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah untuk melakukan pembenahan transportasi secara komprehensif, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa penuh kendaraan terisi (100% Capaian Nasional), tetapi juga dari seberapa aman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

### **Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.11**

Capaian 2025 untuk Indikator Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah adalah 100% terhadap target akhir Renstra sebesar 100 %. Realisasi fisik sebesar 100% secara langsung melampaui ambang batas target akhir yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 99%. Pencapaian angka sempurna (100%) menunjukkan bahwa program keselamatan transportasi daerah pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat efektif sesuai standar baku yang direncanakan.

### **Kondisi yang digambarkan dalam tabel 3.12**

Berdasarkan data pada tabel terbaru, berikut adalah analisis perbandingan realisasi kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 terhadap target daerah lain (Kabupaten Tabalong, Provinsi, dan Nasional).

Terhadap Target Kabupaten Tabalong: Realisasi Kabupaten Balangan (100%) melampaui target Kabupaten Tabalong yang ditetapkan sebesar 90%. Terhadap Target Provinsi & Nasional: Realisasi Kabupaten Balangan (100%) juga berhasil melampaui target tingkat Provinsi dan Nasional yang dipatok pada angka 99,99%.

Secara keseluruhan, Kabupaten Balangan telah menetapkan standart bagi keselamatan transportasi di wilayahnya. Keberhasilan melampaui target Kabupaten tetangga (Tabalong), Provinsi, hingga Nasional memposisikan daerah ini sebagai model percontohan dalam penyelenggaraan transportasi yang aman, produktif, dan efisien secara anggaran.

## **2. Analisis Atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Indikator: Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah)**

Berdasarkan data dokumen perencanaan yang ada dan anggaran Tahun 2025, terdapat beberapa program yang mendukung terhadap pencapaian

kinerja sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah. Berikut keterkaitan program tersebut :

| No | SASARAN STRATEGIS                     | PROGRAM/KEGIATAN  | ALASAN  |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1  | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | dukungan anggaran untuk pemenuhan Pemenuhan perlengkapan jalan di ruas jalan kabupaten berfungsi untuk mengatur, memperingatkan, dan memandu pengguna jalan, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir secara signifikan |

*Tabel 3. 14 Analisis atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Berikut adalah uraian analisis mengenai Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah di Kabupaten Balangan, khususnya terkait pemenuhan sarana dan prasarana jalan. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% pada indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah merupakan hasil langsung dari implementasi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan. Berikut adalah rincian dukungannya :

- Penyediaan Rambu Lalu Lintas, pemasangan rambu yang tepat memberikan peringatan dini akan bahaya, larangan, serta petunjuk arah yang jelas bagi pengemudi, sehingga mampu menekan potensi kecelakaan di titik-titik rawan.
- Pemasangan Marka Jalan, pembatasan lajur melalui marka jalan memastikan disiplin pengguna jalan terjaga, yang berkontribusi pada pencapaian target keselamatan melampaui standar nasional sebesar 99,99%.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi bagian integral dari perlengkapan jalan, PJU meningkatkan visibilitas pengemudi pada

malam hari, yang sangat krusial untuk mempertahankan status *zero accident* di wilayah kabupaten.

- Pagar Pengaman Jalan (Guardrail): Penyediaan sarana pengaman di area dengan profil jalan berisiko (seperti tikungan tajam atau tepi tebing) menjadi instrumen fisik yang melindungi pengguna jalan, termasuk angkutan pelajar yang menjadi prioritas daerah.
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL): Pengaturan arus kendaraan di persimpangan jalan melalui APILL memastikan kelancaran dan keselamatan pergerakan orang dan barang antar kota dalam satu daerah.
- Efisiensi Anggaran: Seluruh pemenuhan perlengkapan jalan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran program LLAJ yang mencatatkan penghematan sebesar 18,87%.

Melalui penyediaan perlengkapan jalan yang komprehensif, Kabupaten Balangan berhasil menciptakan ekosistem transportasi yang tidak hanya produktif dari sisi keterisian penumpang (*Load Factor*), tetapi juga memiliki standar keamanan tertinggi di tingkat regional maupun nasional.

Dari program tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan Instansi Kepolisian (Polres Balangan) merupakan pilar utama dalam mencapai target keselamatan transportasi. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai peran kolaborasi ini

#### - Penegakan Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas

Sinergi dengan kepolisian menjadi faktor penentu tercapainya Tingkat Keselamatan 100% melalui:

- Operasi Penertiban Bersama: Razia rutin terhadap kelayakan kendaraan (KIR) dan kepatuhan administratif memastikan hanya kendaraan yang memenuhi standar keamanan yang beroperasi di jalan raya.
- Manajemen Arus Lalu Lintas: Koordinasi dalam pengaturan arus kendaraan pada jam-jam sibuk (seperti keberangkatan sekolah) meminimalisir risiko kecelakaan bagi pelajar yang menjadi fokus utama layanan angkutan daerah.

Sinergi ini menciptakan pola kerja di mana:

- Dinas Perhubungan menyediakan sarana fisik (perlengkapan jalan, marka, rambu) dan layanan angkutan.
- Kepolisian menyediakan pengawasan fungsional dan penegakan aturan.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Indikator: Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah)

Berikut efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk mencapai target dari Indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Tahun 2025 diantaranya Efisiensi dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) diantaranya subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp. 29.765.268.000 realisasi sebesar Rp. 29.674.624.146 menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 0,3 %.

Efisiensi sebesar **0,3%** pada subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan merupakan bukti bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mengedepankan efektivitas pencapaian target di atas sekadar penghematan **biaya**. Dengan menyerap anggaran secara maksimal (99,7%), daerah berhasil membangun benteng keselamatan infrastruktur yang menjamin keselamatan pengguna jalan dan pelajar hingga mencapai level performa 100%

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian indikator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja. Adapun Realisasi APBD tahun 2025 sebesar Rp.59.088.993.286,00 atau 96,51% dari pagu sebesar Rp. 61.223.979.181,00

Realisasi Belanja Daerah TA. 2024 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel sebagai berikut:

## REALISASI ANGGARAN

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Kinerja |              | Anggaran              | Realisasi Kinerja |              | Realisasi Anggaran    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |              |
|---|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--|--------------|
|   | K              | Rp           | K                     | Rp                | K            | Rp                    |  |              |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>84,18</b>   | <b>Nilai</b> | <b>13.695.585.567</b> | <b>82,00</b>      | <b>Nilai</b> | <b>12.786.897.569</b> | <b>97,4</b>                                    | <b>93,37</b> |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 100            | %            | 138.037.500           | 100               | %            | 132.837.500           | 100  | 96,23        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2              | Dokumen      | 130.307.500           | 2                 | Dokumen      | 130.042.500           | 100  | 99,80        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12             | Laporan      | 7.730.000             | 5                 | Laporan      | 2.795.000             | 41,67  | 36,16        |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100            | %            | 7.629.226.137         | 100               | %            | 7.234.086.160         | 100  | 94,82        |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 45             | Orang        | 7.444.972.137         | 45                | Orang        | 7.052.950.950         | 100  | 94,73        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 12             | Dokumen      | 184.254.000           | 12                | dokumen      | 181.135.210           | 100  | 98,31        |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 100            | %            | 140.785.750           | 100               | %            | 138.383.779           | 100  | 98,29        |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 3              | Paket        | 30.839.750            | 3                 | Paket        | 30.830.000            | 100  | 99,97        |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Target Kinerja |         | Anggaran      | Realisasi Kinerja |         | Realisasi Anggaran | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |       |
|--|----------------|---------|---------------|-------------------|---------|--------------------|--|-------|
|  | K              |         | Rp            | K                 |         | Rp                 | K  | Rp    |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | 50             | Orang   | 109.946.000   | 42                | Orang   | 107.553.779        | 84   | 97,82 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100            | %       | 2.022.772.350 | 100               | %       | 1.954.210.755      | 100  | 96,61 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5              | Paket   | 10.901.400    | 1                 | Paket   | 9.893.000          | 20   | 90,75 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 4              | Paket   | 350.108.400   | 4                 | Paket   | 309.069.499        | 100  | 88,28 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 5              | Paket   | 6.771.350     | 5                 | Paket   | 6.625.300          | 100  | 97,84 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12             | Paket   | 20.973.200    | 5                 | Paket   | 20.920.000         | 41,67  | 99,75 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 12             | Dokumen | 8.118.000     | 12                | Dokumen | 8.094.000          | 100,00   | 99,70 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 1000           | Laporan | 1.625.900.000 | 998               | Laporan | 1.599.608.956      | 99,80  | 98,38 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100            | %       | 1.500.000.000 | 100               | %       | 1.355.000.002      | 100  | 90,33 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 5              | Unit    | 1.500.000.000 | 5                 | Unit    | 1.355.000.002      | 100  | 90,33 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Kinerja |         | Anggaran       | Realisasi Kinerja |         | Realisasi Anggaran | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |       |
|---|----------------|---------|----------------|-------------------|---------|--------------------|--|-------|
|   | K              |         | Rp             | K                 |         | Rp                 | K  | Rp    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100            | %       | 1.309.414.330  | 100               | %       | 1.208.595.911      | 100  | 92,30 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12             | Laporan | 840.283.300    | 12                | Laporan | 802.800.000        | 100  | 95,54 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12             | Laporan | 227.191.000    | 12                | Laporan | 197.014.117        | 100  | 86,72 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 12             | Laporan | 241.940.030    | 12                | Laporan | 208.781.794        | 100  | 86,29 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100            | %       | 955.349.500    | 100               | %       | 763.783.462        | 100  | 79,95 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15             | Unit    | 425.720.000    | 15                | Unit    | 257.153.692        | 100  | 60,40 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 2              | Unit    | 529.629.500    | 3                 | Unit    | 506.629.770        | 150  | 95,66 |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | 91             | %       | 47.528.393.614 | 90                | %       | 46.302.095.717     | 98,90  | 97,42 |
|   | 15,88          | %       |                | 20                | %       |                    | 125,94   |       |
|   | 100            | %       |                | 100               | %       |                    | 100,00   |       |
|   | 92             | %       |                | 80                | %       |                    | 86,96  |       |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 88             | %       | 40.073.486.050 | 100               | %       | 39.275.141.561     | 113,64   | 98,01 |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 6377           | Unit    | 29.765.268.000 | 1377              | Unit    | 29.674.624.146     | 21,59  | 99,70 |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | 4.411          | Unit    | 10.308.218.050 | 1664              | Unit    | 9.600.517.415      | 37,72  | 93,13 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Kinerja |         | Anggaran      | Realisasi Kinerja |         | Realisasi Anggaran |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |  |
|---|----------------|---------|---------------|-------------------|---------|--------------------|-------|--|--|
|   | K              |         | Rp            | K                 |         | Rp                 | K     | Rp   |  |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | 100            | %       | 107.850.000   | 100               | %       | 107.550.000        | 100   | 99,72  |  |
| Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C  | 3              | Orang   | 107.850.000   | 0                 | Orang   | 107.550.000        | 0     | 99,72  |  |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  | 100            | %       | 616.080.200   | 100               | %       | 598.549.424        | 100   | 97,15  |  |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12             | Dokumen | 616.080.200   | 12                | Dokumen | 598.549.424        | 100   | 97,15  |  |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 100            | %       | 5.384.619.174 | 100               | %       | 5.280.366.450      | 100   | 98,06  |  |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 250            | Laporan | 4.898.726.730 | 200               | Laporan | 4.805.111.450      | 80    | 98,09  |  |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 10             | Laporan | 485.892.444   | 12                | Laporan | 475.255.000        | 120   | 97,81  |  |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 95             | %       | 333.025.090   | 80                | %       | 283.286.570        | 84,21 | 85,06  |  |
|   | 100            | %       |               | 100               | %       |                    | 100   |  |  |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 0              | 0 Unit  | 0             | 0                 | Unit    | 0                  |       |  |  |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 0              | 0 Orang | 0             | 0                 | Orang   | 0                  |       |  |  |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Kinerja |           | Anggaran    | Realisasi Kinerja |           | Realisasi Anggaran | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |       |
|--|----------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|--|-------|
|  | K              |           | Rp          | K                 |           | Rp                 | K  | Rp    |
| Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                            | 1798           | Kendaraan | 155.611.050 | 550               | Kendaraan | 126.697.900        | 30,59  | 81,42 |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                      | 1              | Dokumen   | 29.400.000  | 1                 | Dokumen   | 25.000.000         | 100,00   | 85,03 |
| Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | 1              | Laporan   | 3.650.000   | 1                 | Laporan   | 3.600.000          | 100,00   | 98,63 |
| Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                | 0              | Laporan   | 0           | 0                 | Laporan   | 0                  |  |       |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 10             | Laporan   | 135.289.040 | 10                | Laporan   | 127.988.670        | 100  | 94,60 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                      | 2              | Laporan   | 9.075.000   | 0                 | Laporan   | 0                  | 0  | 0,00  |
| Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                       | 0              | Laporan   | 0           | 0                 | Laporan   | 0                  |  |       |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | 0              | Laporan   | 0           | 0                 | Laporan   | 0                  |  |       |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 100            | %         | 79.964.800  | 0%                | %         | 0                  | 0,00   | 0,00  |
| Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin   | 2              | Orang     | 24.000.000  | 0                 | orang     | 0                  | 0  | 0,00  |
| Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                      | 5              | Laporan   | 55.964.800  | 0                 | Laporan   | 0                  | 0  | 0,00  |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Kinerja |      | Anggaran              | Realisasi Kinerja |      | Realisasi Anggaran    |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran |  |
|--|----------------|------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|--------|--|--|
|  | K              |      | Rp                    | K                 |      | Rp                    | K      | Rp   |  |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 80             | %    | 933.368.300           | 80                | Unit | 757.201.712           | 100    | 81,13  |  |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 19             | Unit | 933.368.300           | 14                | Unit | 757.201.712           | 73,68  | 81,13  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)   |                |      |                       |                   |      |                       | 73,68  | 81,13  |  |
| Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)  |                |      |                       |                   |      |                       | Sedang | Tinggi   |  |
| <b>Jumlah Anggaran dari seluruh Program</b>  |                |      | <b>61.223.979.181</b> |                   |      | <b>59.088.993.286</b> |        | <b>96,51</b>                                   |  |

*Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran*

### **A. KESIMPULAN**

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dijelaskan bahwa Sasaran Strategis yang hendak dicapai adalah 1. Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi dengan Indikator Persentase *Load Factor* , 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi dengan indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase *Load Factor* (daya angkut) yang dicapai pada tahun 2025 adalah 107,21% . Dengan daya tampung sebesar 208 penumpang dan jumlah tampung sebesar 232 penumpang. Mengammbarkan masih ada potensi kurang daya angkut berbanding jumlah armada.
2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah yang dicapai adalah 100%, artinya selama tahun 2025 tidak ada kecelakaan angkutan yang terjadi di Kabupaten Balangan.

Pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2025 didukung beberapa faktor diantaranya dukungan pemenuhan anggaran dan kebijakan terhadap penambahan jumlah armada tahun 2025, adanya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di tingkat Kabupaten/Kota memastikan infrastruktur jalan memiliki standar keamanan yang memadai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan basis pengguna yang stabil melalui kegiatan belajar mengajar siswa, kerjasama dengan Polres Balangan dalam hal pemantauan lalu lintas jalan raya dan forum LLAJ.

## B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kondisi yang ada di Kabupaten Balangan tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang ada diantaranya :

1. Dampak Angkutan ODOL (*Over Dimension Over Loading*)
2. Tantangan Kapasitas Armada (*Overcapacity*)
3. Vandalisme dan Pemeliharaan terhadap perlengkapan jalan yang sudah ada
4. Kebutuhan Koordinasi Penegakan Hukum dengan pihak Kepolisian

Untuk mengatasi hal di atas, Dinas Perhubungan kedepan akan berupaya :

1. Penguatan Operasi GAKKUM: Meningkatkan frekuensi penertiban kendaraan ODOL bekerja sama dengan Polres Balangan.
2. Upgrade Kapasitas untuk perencanaan penambahan unit armada atau pemanfaatan fasilitas terminal yang sebentar lagi beroperasi
3. Pemasangan Teknologi Pengawasan: Mempertimbangkan penggunaan alat pemantau berat kendaraan (WIM portabel) pada titik strategis jalan kabupaten

| No | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                    | Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut |
|----|---|--|
| 1  | Melaksanakan Rapat Forum LLAJ lintas sektor dengan Kepolisian | April 2026                                   |
| 2  | Melaksanakan Gakum LLAJ                                       | Juni 2026                                    |
| 3  | Monev dan Evaluasi layanan Angkutan Gratis                    | April 2026                                   |
| 4  | Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan          | April 2026                                   |

*Tabel 4. 1 Ringkasan Kendala dan Tindak Lanjut*

## Ringkasan Kendala dan Tindak Lanjut di Aplikasi E-Sakip Pro

The screenshot shows the 'Detail Masalah dan Tindak Lanjut' (Detail Problem and Follow-up) page in the E-Sakip Pro application. The page is for the year 2025 and displays a list of programs and their associated issues. The table below summarizes the data shown in the screenshot.

| Program   | Masalah (Problem)   | Status (Status) | Tindak Lanjut (Follow-up) |
|---|---|-----------------|---------------------------|
| <b>01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |   |                 |                           |
| <b>01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |                 |                           |
| 01.0001.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 01.0006.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | M: Tidak Ada    | T:                        |
| <b>02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |                 |                           |
| 02.0001.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 02.0003.  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | M: Tidak Ada    | T:                        |
| <b>05. Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>                        |   |                 |                           |
| 05.0002.  | Pengadaan Pakaihan Dines Beserta Atribut Kelengkapannya                               | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 05.0011.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | M: Tidak Ada    | T:                        |
| <b>06. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |   |                 |                           |
| 06.0001.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 06.0002.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 06.0003.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | M: Tidak Ada    | T:                        |
| 06.0005.  | Penyediaan Darang Celakari dan Penggantian  | M: Tidak Ada    | T:                        |

**Gambar 4. 1** Ringkasan Kendala dan Tindak Lanjut di Aplikasi E-Sakip Pro

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi ini sangat penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi dalam LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada Rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

Paringin, Januari 2025  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Balangan

Drs. MUSA., M.AP  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196801131997031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. MUSA, M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Abdul Hadi

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

  
Abdul Hadi

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

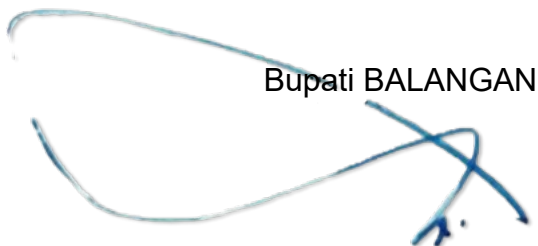
  
DRS. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)                                   | Indikator<br>(3)                                  | Target<br>(4) |
|-----------|--|---|---------------|
|           | <b>SASARAN</b>   |   |               |
| 1         | Meningkatnya Keselamatan Transportasi                      | Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten | 99,99 %       |
| 2         | Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi             | Persentase Load Factor                            | 105,9 %       |
| 3         | Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                       | 76,65 Nilai   |
|           |  | Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah          | 4,49 %        |
|           |  | Indeks Inovasi Perangkat Daerah                   | 74 %          |
|           |  | IKM Perangkat Daerah                              | 89,43 %       |
|           |  |   |               |
|           |  |   |               |

|   | Program   | Anggaran              |
|---|---|-----------------------|
|   | Program   |                       |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 26.648.129.680        |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 13.209.992.671        |
|   |   |                       |
|   | <b>Total</b>  | <b>39.858.122.351</b> |

Bupati BALANGAN



Abdul Hadi

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



DRS. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. MUSA, M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)  
NIP 197207132007011015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)   | Indikator<br>(3)                        | Target<br>(4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat<br>(PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA217) | Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan | 85,39 Nilai   |
|           |  |   |               |
|           |  |   |               |

|   | Program   | Anggaran       |
|---|---|----------------|
|   | Program   |                |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.209.992.671 |
|   |   |                |
|   | Total   | 13.209.992.671 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

Plt. SEKRETARIS



MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)  
NIP 197207132007011015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHPUDZ AMIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD, S.Pd.I (Plt)

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD, S.Pd.I (Plt)  
NIP 197207132007011015

PIHAK PERTAMA

MAHPUDZ AMIN, SE  
NIP 198502142010011016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**BALANGAN**

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|--|--|---------------|
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1         | - (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket       |
| 2         | - (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang      |
| 3         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 2 Paket       |
| 4         | Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket       |
| 5         | - (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket       |
| 6         | - (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket      |
| 7         | - (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen    |
| 8         | - (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 475 Laporan   |
| 9         | - (Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 9 Unit        |
| 10        | - (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan    |
| 11        | - (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan    |
| 12        | - (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan    |

|    |   |  |        |
|----|---|--|--------|
| 13 | - (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit |
| 14 | - (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit |
|    |   |  |        |

|    | Program Sub Kegiatan  | Anggaran      |
|----|---|---------------|
|    | Program   |               |
|    | Sub Kegiatan  |               |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | 17.872.500    |
| 2  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 82.640.000    |
| 3  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 7.651.600     |
| 4  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 223.676.500   |
| 5  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 2.657.700     |
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 17.409.600    |
| 7  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.443.000     |
| 8  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1.519.744.000 |
| 9  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 2.066.480.000 |
| 10 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 305.688.800   |
| 11 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 183.599.000   |
| 12 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 290.967.000   |
| 13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 217.437.500   |
| 14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 305.445.610   |
|    |   |               |
|    | Total   | 5.243.712.810 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

Pit. SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN



MUHAMMAD, S.Pd.I (Pit)  
NIP 197207132007011015



MAHPUDZ AMIN, SE  
NIP 198502142010011016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL AL BANJARI, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD, S.Pd.I (Plt)

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD, S.Pd.I (Plt)  
NIP 197207132007011015

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD IQBAL AL BANJARI, SH  
NIP 198411122010011014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**BALANGAN**

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|---|--|---------------|
| (1)       | (2)   | (3)  | (4)           |
| 1         | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen     |
| 2         | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan     |
| 3         | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen    |
|           |   |  |               |

|   | Program Sub Kegiatan  | Anggaran    |
|---|---|-------------|
|   | Program   |             |
|   | Sub Kegiatan  |             |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 141.471.000 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.115.500   |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 435.109.000 |
|   |   |             |
|   | Total   | 579.695.500 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS



MUHAMMAD, S.Pd.I (Pit)  
NIP 197207132007011015

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN



MUHAMMAD IQBAL AL BANJARI, SH  
NIP 198411122010011014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSMA HILDA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. MUSA, M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

PIHAK PERTAMA

ROSMA HILDA, ST  
NIP 198202112006042007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)  | Indikator<br>(3)  | Target<br>(4) |
|-----------|---|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya kualitas manajemen lalu lintas jalan (PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)93) | Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas                                    | 100 %         |
| ..        | Menurunnya pelanggaran moda transportasi  | Persentase penurunan jumlah tilang/sanksi angkutan umum dan barang dalam setiap tahun | 25,71 Persen  |
|           |   |   |               |
|           |   |   |               |

|   | Program   | Anggaran       |
|---|---|----------------|
|   | Program   |                |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 26.648.129.680 |
|   |   |                |
|   | Total   | 26.648.129.680 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS

Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN  
KESELAMATAN

ROSMA HILDA, ST  
NIP 198202112006042007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR SYARIF, S.SOS

Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ROSMA HILDA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

ROSMA HILDA, ST  
NIP 198202112006042007

PIHAK PERTAMA

UMAR SYARIF, S.SOS  
NIP 198010172010011017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)  | Indikator<br>(3)   | Target<br>(4) |
|-----------|---|--|---------------|
| 1         | - (Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C)  | Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.  | 3 Orang       |
| 2         | - (Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik) | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Dokumen    |

|   | Program Sub Kegiatan  | Anggaran    |
|---|---|-------------|
|   | Program   |             |
|   | Sub Kegiatan  |             |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C  | 154.350.000 |
| 2 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 457.863.500 |
|   | Total   | 612.213.500 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN  
KESELAMATAN



**ROSMA HILDA, ST**  
NIP 198202112006042007

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



**UMAR SYARIF, S.SOS**  
NIP 198010172010011017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARES KUSMAWANDY, ST

Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ROSMA HILDA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

ROSMA HILDA, ST  
NIP 198202112006042007

PIHAK PERTAMA

ARES KUSMAWANDY, ST  
NIP 197905022009041002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)  | Indikator<br>(3)  | Target<br>(4) |
|-----------|---|---|---------------|
| 1         | - (Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin)                        | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | 2 Orang       |
| 2         | - (Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin) | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi       | 2 Laporan     |
|           |   |   |               |

|   | Program Sub Kegiatan  | Anggaran   |
|---|---|------------|
|   | Program   |            |
|   | Sub Kegiatan  |            |
| 1 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                        | 30.000.000 |
| 2 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | 52.136.800 |
|   |   |            |
|   | Total   | 82.136.800 |

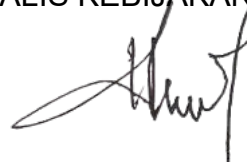
BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG PRASARANA DAN  
KESELAMATAN



ROSMA HILDA, ST  
NIP 198202112006042007

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



ARES KUSMAWANDY, ST  
NIP 197905022009041002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. MUSA, M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)  
NIP 197207132007011015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALANGAN**

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)   | Indikator<br>(3)                        | Target<br>(4) |
|-----------|--|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat<br>(PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA217) | Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan | 85,39 Nilai   |
|           |  |   |               |
|           |  |   |               |

|   | Program   | Anggaran       |
|---|---|----------------|
|   | Program   |                |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.209.992.671 |
|   |   |                |
|   | Total   | 13.209.992.671 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



Drs. MUSA, M.AP  
NIP 196801131997031007

Plt. SEKRETARIS



MUHAMMAD, S.PD.I (PLT)  
NIP 197207132007011015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY HARIANTO, M.T.

Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD, S.Pd.I

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD, S.Pd.I  
NIP 197207132007011015

PIHAK PERTAMA

DEDY HARIANTO, M.T.  
NIP 198101042009041002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**BALANGAN**

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|---|--|---------------|
| (1)       | (2)   | (3)  | (4)           |
| 1         | - (Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor)                     | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                         | 1.814 Unit    |
| 2         | - (Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | 1 Dokumen     |
| 3         | - (Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan     |
| 4         | - (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara            | 10 Unit       |
| 5         | - (Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)               | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 2 Laporan     |
|           |   |  |               |

|   | Program Sub Kegiatan  | Anggaran    |
|---|---|-------------|
|   | Program   |             |
|   | Sub Kegiatan  |             |
| 1 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                     | 199.163.500 |
| 2 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 31.200.000  |
| 3 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.155.000   |
| 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | 110.000.000 |
| 5 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 4.950.000   |
|   | Total   | 346.468.500 |

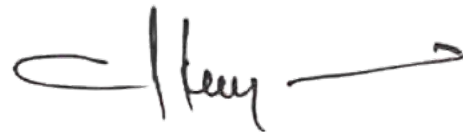
BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN



MUHAMMAD, S.Pd.I  
NIP 197207132007011015

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



DEDY HARIANTO, M.T.  
NIP 198101042009041002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD FAJAR KAUSAR, S.SOS

Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MUHAMMAD, S.Pd.I

Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BALANGAN, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD, S.Pd.I  
NIP 197207132007011015

PIHAK PERTAMA

AHMAD FAJAR KAUSAR, S.SOS  
NIP 198206012010011028

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**BALANGAN**

| <b>No</b><br>(1) | <b>Sasaran</b><br>(2)  | <b>Indikator</b><br>(3)   | <b>Target</b><br>(4) |
|------------------|--|---|----------------------|
| 1                | - (Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota)  | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen            |
| 2                | - (Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 3.818 Unit           |
| 3                | - (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan)   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 2.900 Unit           |
| 4                | - (Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota) | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 20 Unit              |
|                  |  |   |                      |

|   | Program Sub Kegiatan   | Anggaran       |
|---|--|----------------|
|   | Program  |                |
|   | Sub Kegiatan   |                |
| 1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  | 100.000.000    |
| 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | 9.967.084.680  |
| 3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | 11.793.660.400 |
| 4 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.180.651.100  |
|   |  |                |
|   | Total  | 23.041.396.180 |

BALANGAN, 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN



MUHAMMAD, S.Pd.I  
NIP 197207132007011015

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AHMAD FAJAR KAUSAR, S.SOS  
NIP 198206012010011028

